

GAJI TUNGGAL ASN BERLAKU TAHUN DEPAN?

Wacana sistem penggajian tunggal (single salary) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat ke permukaan. Wacana tersebut muncul dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Di dalam dokumen itu, sistem penggajian tunggal menjadi bagian dalam kebijakan penguatan kelembagaan melalui intervensi belanja kementerian atau lembaga (K/L). Penerapan penggajian tunggal yang disebut dalam dokumen itu akan dilakukan pada periode jangka menengah, bersama dengan penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, serta transformasi kesejahteraan. "Hal lain yang dilakukan pada periode jangka menengah adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal," dikutip dari dokumen, Selasa (26/8/2025). Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif, menepis system tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini, selain itu juga belum ada pembahasan lebih lanjut. Meski demikian, sudah ada beberapa instansi yang siap menerapkan sistem itu, salah satunya adalah Kementerian Agama (Kemenag) yang mengatakan akan menerapkannya pada 2026 mendatang.

[BACA HAL 11...](#)

INSTANSI DAN PEMDA YANG SUDAH MENERAPKAN GAJI TUNGGAL:



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
Agama



Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)



Pusat Pelaporan
dan Analisis
Transaksi
Keuangan (PPATK)



Badan Pusat
Statistik (BPS)



Badan Pencarian
dan Pertolongan
atau Basarnas



Lembaga
Administrasi
Negara (LAN)



Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat

Pemerintah
Kota Sukabumi



Pemerintah
Kabupaten
Bandung



Pemerintah
Kabupaten Manggarai



Pemerintah
Kabupaten
Manggarai Barat



Pemerintah
Kota Sorong



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan



Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi

INDONESIA KEKURANGAN 70 RIBU DOKTER SPESIALIS, INI LANGKAH PRESIDEN

Indonesia mengalami kekurangan 70.000 dokter spesialis, yang masih menjadi tantangan besar. Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, diperlukan upaya serius. Kepala Negara ini menyatakan sudah menyiapkan langkah untuk menyetiasinya.

“**S**aya mendapat laporan, kita kekurangan 70.000 dokter spesialis. 70.000, kita harus segera mengejar itu,” katanya saat berpidato meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Presiden Prabowo menyebut produksi tenaga medis nasional saat ini masih jauh dari kebutuhan. “Hari ini, saya dapat laporan kita menghasilkan dokter umum hanya 12.000 satu tahun. Dokter spesialis 2.700. Jadi, kalau kita mengharapkan mengisi 70.000 dokter spesialis, kita harus nunggu 35 tahun,” ujarnya dilansir antara.

Dia pun menekankan untuk segera mengambil langkah untuk

mengetiasinya. “Kita tidak bisa business as usual. Kita harus bekerja lebih keras dan menggunakan segala kemampuan kita untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Untuk itu, Presiden Prabowo berencana membuka 30 fakultas kedokteran di sejumlah universitas. Namun, Prabowo belum menyebut kapan rencana itu dilakukan. Kepala Negara juga akan membuka 148 program studi (prodi) baru di 57 fakultas kedokteran pada tahun ini. Rincinya, 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspecialis.

Pembukaan fakultas kedokteran dan prodi tersebut bisa mengejar kekurangan 70 ribu dokter spesialis dan 140 ribu dokter umum. “Kalau tidak segera, bisa tunggu 35 tahun,” ujar Prabowo.

Jumlah dokter spesialis dan dokter umum yang dihasilkan kampus saat ini dinilai tidak akan cukup untuk mengisi kekurangan dokter. Prabowo meminta menteri-menteri melakukan langkah cepat dan mengambil inovasi untuk mengejar pembangunan Indonesia. “Mengejar kesejahteraan Indonesia itu tidak bisa business as usual, tidak bisa,” ujar dia.

Pernyataan Prabowo yang berencana membuka dan menambah jumlah fakultas kedokteran bukan kali pertama. Dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 16 Agustus 2025, Prabowo sudah mengatakan berencana membuka 148 prodi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia tahun ini.

Selain itu juga akan menambah kuota mahasiswa penerima beasiswa. Namun dia tidak menjelaskan jumlah kuota yang ditambah. “Kami akan tambahkan 25 prodi umum dan prodi gigi serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Pada Rabu (25/6/2025) dilansir tempo, Prabowo meminta Menteri

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)



Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yulianto menambah jumlah fakultas kedokteran. “Kita harus segera tambah fakultas kedokteran,” ujar Prabowo dalam peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Sanur dan Bali Internasional Hospital, Denpasar, Rabu (25/6/2025).

Prabowo juga meminta kedua menteri menambah akademi perawat dan pendidikan spesialis. Dia meminta penambahan itu harus dilakukan dengan efisien. “Jangan terlalu terimpit oleh prosedur serta peraturan kuno, peraturan yang tidak bisa menjawab kesulitan dan tantangan masa kini,” ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Majelis Guru Besar Ke-dokteran Indonesia (MGBKI) menilai rencana pemerintah membuka 148 program studi (prodi) di 57 fakultas kedokteran di tahun ini ber-potensi menimbulkan banyak masalah. Ketua MGBKI Budi Iman Santoso menyebut masalah yang paling utama adalah ketersediaan tenaga pendidik dokter.

Menurut Budi, rencana tersebut terlalu ambisius jika dibandingkan dengan keter-sediaan sumber daya manusia pen-didik saat ini. Ia mengatakan peme-rintah semestinya menyiapkan ter-lebih dulu ke-butuhan dasar ter-sebut alih-alih fokus pada jumlah produksi dokter yang ingin dicapai. “Seperti bangun

rumah, itu kan harus punya pondasi. Standar input dipenuhi baru output,” ujar dia dalam acara deklarasi guru besar kedokteran se-Indonesia di Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Berdasarkan pengalamannya, Budi menuturkan, proses membuka satu program studi membutuhkan persiapan yang sangat lama bahkan bertahun-tahun. Ia menilai ketergesaan dalam membuka prodi baru berpotensi menurunkan standar kompetensi dokter, hingga mengancam keselamatan pasien. “Masalahnya kedokteran itu berhubungan dengan manusia, dan tidak boleh gagal,” kata dia.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di setiap kabupaten dalam empat tahun mendatang. Menurutnya, fasilitas kesehatan modern dengan tenaga medis yang memadai akan menentukan keselamatan pasien, terutama dalam penanganan penyakit kritis seperti stroke.

“Kalau kena stroke, 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam selamat bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama bisa jadi beban bagi keluarga. Jadi bagaimana caranya menteri kesehatan, 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten di Indonesia. Bisa?” katanya kepada jajaran Kemenkes. (han,ant,ist/lut)



Hari ini, saya dapat laporan kita menghasilkan dokter umum hanya 12.000 satu tahun. Dokter spesialis 2.700. Jadi, kalau kita mengharapkan mengisi 70.000 dokter spesialis, kita harus nunggu 35 tahun,”

PRABOWO SUBIANTO

Presiden RI

INDONESIA BISA BENTUK KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Dengan demikian, Indonesia bisa memiliki Kementerian Haji dan Umrah, karena pemerintah kemungkinan akan membentuknya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pengesahan RUU tersebut membawa konsekuensi penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk kemungkinan pembentukan kementerian baru.

“Kalau lihat dari revisi undang-undang tersebut konsekuensinya ada kementerian baru. Tapi kita akan serahkan kepada pemerintah nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang digabung. Kita serahkan kepada pemerintah,” ujar Dasco, Selasa (26/8/2025).

Dasco menegaskan, DPR hanya menjalankan fungsi legislasi dengan menyelesaikan revisi UU, sementara



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Foto : Parlemenaria

implementasi lebih lanjut berada di ranah eksekutif. Menurutnya, keputusan terkait penambahan maupun penggabungan kementerian sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah.

Untuk diketahui, dalam Rapat Paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Mulanya pimpinan DPR memberi waktu kepada Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan laporan ke seluruh peserta rapat. Marwan menyampaikan sejumlah poin substansi dalam rangka memperkuat pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Marwan Dasopang dalam laporannya menyampaikan bahwa pengajuan RUU ini merupakan usul inisiatif Komisi VIII DPR RI sebagai respons atas kebutuhan peningkatan pelayanan jemaah, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan Arab Saudi, serta kebutuhan hukum setelah Presiden RI menetapkan pembentukan badan penyelenggara khusus.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah bersepakat kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini akan menjadi one stop service, mengoordinasikan seluruh urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, baik terkait

infrastruktur, SDM, maupun pelayanan jemaah,” ungkap Marwan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan konstruksi RUU terdiri atas 16 bab dengan 130 pasal, mengatur mulai dari ketentuan umum, jamaah haji, biaya penyelenggaraan, kelompok bimbingan, penyelenggaraan haji reguler maupun khusus, umrah, koordinasi, kelembagaan, pendidikan, keadaan darurat, hingga ketentuan pidana dan peralihan.

Setelah itu, Cucun menanyakan kepada seluruh anggota Dewan apakah revisi UU Haji tersebut dapat disetujui menjadi undang-undang. “Apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang memimpin rapat. Pertanyaan itu dijawab serentak oleh para anggota dewan dengan kata “setuju.”

Undang-undang tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola ibadah haji dan umrah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjamin keadilan bagi seluruh jemaah.

Rapat paripurna pengesahan revisi UU Haji dan Umrah ini turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menag Nasaruddin Umar hingga Menkum Supratman Andi Agtas. Mewakili Presiden RI, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pendapat akhir Presiden.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah merupakan hak warga negara yang dijamin UUD 1945, sehingga negara wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan agar pelaksanaannya aman, nyaman, tertib, serta sesuai syariat.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019, agar penyelenggaraan haji dan umrah dapat dilaksanakan lebih baik, termasuk optimalisasi pemanfaatan kuota, perlindungan bagi jemaah visa nonkuota, serta penggunaan sistem informasi kementerian,” ujar Supratman.

Dia menandakan bahwa jutaan jemaah Indonesia yang melangsungkan haji harus dipastikan keamanannya. “Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekedar spiritual, tetapi juga merupakan wujud nyata dari keberagaman bangsa Indonesia dan amanat konstitusional yang harus kita lindungi dan sempurnakan penyelenggaraannya,” kata Supratman membacakan sambutan Prabowo.

“Setiap tahun jutaan umat Islam di Indonesia menantikan kesempatan untuk dapat menunaikan rukun Islam kelima ini. Masyarakat menaruh harapan besar agar proses pendaftaran keberangkatan pelayanan di Tanah Suci hingga kepulangan berlangsung dengan tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan syariat,” tambahnya dilansir detik.

Presiden Prabowo Subianto menyebut revisi UU Haji dan Umrah bukan untuk mengubah esensi pelaksanaan haji yang sudah berjalan di RI. Namun, RUU ini dikatakan hadir untuk memperkuat regulasi yang ada.

Dia menandakan bahwa RUU ini hadir bukan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah dibangun selama ini. Akan tetapi malah akan memperkuat, menyempurnakan, dan menyesuaikan sistem penyelenggaraan haji dan umrah dengan dinamika zaman, kebutuhan jemaah serta prinsip tata kelola pemerintahan yang modern transparan dan akuntabel. (han,rls,ist/lut)



Kalau lihat dari revisi undang-undang tersebut konsekuensinya ada kementerian baru. Tapi kita akan serahkan kepada pemerintah nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi, atau kemudian ada yang digabung. Kita serahkan kepada pemerintah,”

**SUFMI
DASCO AHMAD**
Wakil Ketua DPR RI

AGUSTUS BERDARAH DI TAPAL BATAS INDONESIA-TIMOR LESTE

Konflik antar warga di perbatasan Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Nusa Tenggara Timur (NTT) memanas. Dalam sebulan, yaitu Agustus 2025, dua Warga Negara Indonesia (WNI) telah menjadi korban penembakan warga Timor Leste.

Kejadian pertama terjadi tepat pada HUT Kemerdekaan RI ke 80, Minggu 17 Agustus 2025. Seorang warga Dusun Lamasi A, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT berinisial ATB (33) tewas tertembak di wilayah Fatumea, Distrik Suai, Kobalima, Timor Leste.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan peristiwa memilukan ini bermula ketika korban bersama 20 rekannya memasuki wilayah Timor Leste untuk berburu hewan liar.

Sekitar pukul 23.00 Wita, terdengar suara tembakan hingga enam kali disertai teriakan menggunakan bahasa lokal. Rekan-rekan korban sempat melarikan diri, namun korban tidak kembali. Keesokan harinya, korban ditemukan meninggal dunia.

Polres Belu menangani kasus ini secara profesional, humanis, dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Saat ini, Polres Belu dan Polsek Tasifeto Timur telah mengambil langkah cepat dengan menghalau warga agar tidak masuk ke wilayah Timor Leste.

Bentrokan berdarah kembali terjadi di Distrik Oecusse tepatnya di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU, NTT, Senin 25 Agustus 2025. Bentrok kali ini dipicu perebutan tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste di desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU.

Bentrokan itu menyebabkan, Paulus Oki (58), warga Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT terluka terkena tembakan yang diduga dilakukan warga RDTL.

Bentrokan ini berawal saat adanya pembangunan 100 pilar batas negara dari Desa Inbate sampai ke Desa Nunpo, Kabupaten TTU. Beberapa warga Desa Inbate mulai resah karena kebun mereka masuk dalam wilayah Republik Demokrat Timor Leste.

Warga pun merasa tidak puas dan protes, karena menurut mereka kebun yang dikelola masih dalam wilayah Republik Indonesia bukan merupakan wilayah RDTL.

100 buah pilar yang akan dibangun

oleh Republik Demokrat Timor Leste sebagai pilar batas antara kedua negara telah menjadi permasalahan yang belum terselesaikan yaitu pilar nomor 35.

Masalah tersebut menurut pemerintah pusat sudah selesai. Namun masyarakat lokal menganggap permasalahan tersebut belum terselesaikan karena sampai saat ini masyarakat belum menerima hasil isi kesepakatan.

Masyarakat lokal masih tetap mengikuti batas provinsi yang telah dibuat dan disepakati pada tahun 1988 lalu. Atas kesepakatan itu, masyarakat tetap berkeras mempertahankan wilayah yang digunakan untuk dikelola dan merupakan bagian dari wilayah NKRI.

Masyarakat Inbate yang merasa dirugikan bersama-sama pergi ke lokasi pemasangan 100 pilar batas tersebut. Mereka melakukan aksi protes agar pihak RDTL menghentikan pembangunan tersebut.

Pasca-kejadian, aparat TNI, Polri dan pemerintah setempat langsung ke lokasi kejadian. Dandim 1618/TTU,



Petugas Inafis Polres Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan olah tempat kejadian perkara, usai seorang warga Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Paulus Kaet Oki (60) diduga ditembak polisi Timor Leste. (Dokumen Polres TTU)

Letkol Arm Didit Prasetyo, Dansatgas Pamantas RI-RDTL Distrik Oecusse, dan Kapolres Timor Tengah Utara, AKBP Eliana Papote dan jajaran langsung ke lokasi kejadian.

Di lokasi ditemukan selongsong peluru kaliber 5,56 MM tercecer di TKP. Selongsong peluru tersebut diduga milik warga Timor Leste saat menembak warga Indonesia.

Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Yoseph Falentinus Delasalle Kebo buka suara usai warganya di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat ditembak polisi Perbatasan Timor Leste (Unidade Patrullamentu Fronteira/UPF) karena melakukan aksi protes.

Ia mengatakan Timor Leste tidak mematuhi kesepakatan untuk tidak melakukan pemasangan patok di daerah yang masih berkonflik atau status quo.

"Peristiwa itu terjadi karena pihak Timor Leste, pihak Kepolisian Timor Leste, UPF Timor Leste ini tidak mengikuti kesepakatan yang disepakati," katanya.

Dia mengungkapkan pada Minggu (24/8/2025) pihak Timor Leste

meminta izin untuk pemasangan patok perbatasan. Sementara warga meminta agar pemasangan patok tidak dilakukan di patok 36 sekitar Desa Inbate yang berbatasan langsung dengan distrik Oecusse.

Alasannya, kata Yoseph, wilayah itu masih berstatus quo atau bersengketa karena belum ada penyelesaian dari kedua negara. Namun larangan yang disepakati oleh 15 kepala keluarga di Desa Inbate yang tetap memasang patok pada Senin (25/8/2025). (wid,ist,rls/dya)

Kronologi Singkat Warga NTT Ditembak Aparat Timor Leste

- **Waktu & Lokasi:**
Senin, 25 Agustus 2025, pukul 09.00 WITA di Tapal 36, Dusun Nino, Desa Inbate, TTU, NTT.
- **Pemicu:**
Warga mencabut ilalang, mendapati UPF Timor Leste memasang patok baru yang bergeser 100-200 m ke wilayah Indonesia.
- **Bentrokan:**
24 warga mencoba menghentikan, UPF datang bersenjata dan melepaskan 8 tembakan.
- **Korban:**
Paulus Kaet Oki tertembak di bahu kanan, dievakuasi ke fasilitas kesehatan.
- **Barang Bukti:**
8 selongsong peluru dan 1 proyektil laras panjang ditemukan di lokasi.



"Langkah utama yang diambil adalah melindungi keselamatan masyarakat serta memastikan setiap warga yang terdampak mendapat pendampingan dan penanganan medis yang layak," kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, di Kupang, dilansir Antara, Selasa (26/8/2025). (ant,ist/dya)

Gubernur NTT Minta Pelaku Diproses Hukum

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menanggapi kasus penembakan terhadap seorang warga Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), oleh aparat keamanan Timor Leste. Melki meminta, pelaku penembakan dihukum sesuai aturan di Timor Leste.

"Kita sudah sampaikan kepada Forkopimda TTU dan TNI-Polri yang berada di batas negara untuk berkoordinasi dengan pihak Timor Leste untuk memastikan pelaku penembakan ini diproses secara hukum melalui mekanisme di Timor Leste," kata Melki, Selasa (26/8/2025).

Melki juga telah meminta aparat TNI-Polri serta Pemerintah Kabupaten TTU agar bisa meredakan

warga di perbatasan RI-Timor Leste, khususnya di Desa Inbate agar tetap tenang.

Warga pun diminta agar menyerahkan semua persoalan itu kepada para pemimpin di wilayah TTU, untuk secepatnya berkoordinasi dengan otoritas Timor Leste. Dia juga berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi. "Kami juga minta pihak Timor Leste agar bisa mengendalikan aparat dan warganya di batas negara. Apa pun kejadiannya bisa disampaikan dan dibicarakan dengan baik. Bisa juga melalui dialog," kata Melki.

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) bertindak cepat sesuai bentrok di patok 36 perbatasan RI-Timor Leste pada Senin (25/8/2025).



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menjenguk anak terkena Campak di Sumenep. (Dok)

46 KLB CAMPAK HANTUI 13 PROVINSI DI RI

"Kalau kita PHBS-nya kurang akan sangat mudah menular, dan kalau ada anggota keluarga kita yang sakit ini mohon bisa menggunakan masker saat berinteraksi supaya tidak tertular," pesan Prima.

Penangan Bila Teejangkit

Menurut dokter spesialis anak subspecialis kesehatan anak infeksi dan penyakit tropis, Hinky Hindra Irawan Satari, anak yang sedang mengalami campak tidak bisa mendapatkan vaksin dan imunisasi.

"Kalau lagi sakit, enggak bisa divaksinasi, kalau setelah sembuh sebagian besar yang terkena campak dia kebal seumur hidup," jelas Hinky di kesempatan berbeda.

Tetapi, meski anak telah kebal pada penyakit campak, anak tetap memerlukan imunisasi. Hinky menyebut, vaksin rubella yang tersedia di Indonesia adalah vaksin MR (Measles dan Rubella), yang merupakan vaksin untuk mencegah kedua penyakit tersebut secara bersamaan. Hinky membolehkan anak yang telah kebal terhadap campak divaksinasi menggunakan MR.

"Di Indonesia kan yang tersedia vaksinnya MR, jadi gimana disuntik MR boleh apa enggak? Dianjurkan, karena vaksin itu kan virus yang

dilemahkan, si virus yang dilemahkan dalam komponen vaksin itu akan dinetralkan oleh antibodi yang telah dimiliki anak itu. Tapi kan rubella anak itu belum punya, nanti kekebalan rubellanya akan terbentuk," jelas Hinky.

Gejala awal campak biasanya ditandai dengan munculnya ruam, belekan, bibir kering, dan sariawan.

Anak yang terjangkit campak juga dapat mengalami diare hebat sebagai komplikasi dari penyakit ini. Dalam beberapa kasus, infeksi paru-paru dapat terjadi, bahkan dapat mengakibatkan kebutaan.

Setelah virus campak masuk ke dalam tubuh, ia dapat menyebabkan penurunan kadar vitamin A yang penting bagi kesehatan. Vitamin A berperan dalam menjaga kesehatan epitel, yang biasanya terdapat di mata dan paru-paru. (wid,rls,ant/dya)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengakui ketimpangan pendapatan asli daerah (PAD) ke APBD di berbagai wilayah Indonesia berpotensi melebar karena kebijakan efisiensi anggaran transfer ke daerah. Kondisi akan lebih miris dan kontras bila di potret per wilayah, Jawa dan luar Pulau Jawa.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak terjadi di 46 wilayah di 42 kabupaten/kota dan 14 provinsi berdasarkan data per 24 Agustus 2025. Empat belas provinsi itu adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, dan Gorontalo

"KLB campak pasti ini adalah campak yang setelah pemeriksaan laboratorium positif dan ditemukan antibodi campak pada anak-anak yang menderita gejala," kata dr Prima Yosephine, MKM, Direktur Imunisasi Kemenkes dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (26/8/2025).

Prima menyampaikan, jumlah kasus suspek campak secara nasional mencapai 23.128 orang, dengan 3.444 pasien terkonfirmasi. Adapun, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi daerah suspek terbanyak, yakni 2.139 kasus.

"Campak ini penyakit berbahaya dan menyebabkan kematian, bahkan penularannya lebih cepat dari COVID-19," ujarnya.

Ia juga menyinggung cakupan imunisasi masih sangat rendah. Dengan rincian, vaksinasi campak-rubella 1 dan 2 tahun 2025 baru 45 persen dari target 95 persen.

"Tidak menunda dan tidak takut imunisasi. Yakin dan percaya vaksin campak aman dan bermutu, semata-mata untuk melindungi anak kita dari komplikasi penyakit serius," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat, khususnya orang tua dan pengasuh anak, untuk memerhatikan sejumlah hal. Pertama, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi campak. Kedua, jangan menunda dan takut imunisasi.

Ketiga, masyarakat diimbau untuk ikut menyampaikan pentingnya imunisasi campak kepada orang-orang terdekat. Keempat, segera periksakan anak ke dokter jika mengalami demam, bercak merah di kulit, batuk, pilek, dan mata merah.

Kelima, terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Salah satunya dengan mengenakan masker saat berinteraksi dengan penderita campak. Hal ini mengingat campak menular melalui droplet.

Sumenep Tertinggi: 17 Meninggal, 89% Anak Tak Pernah Imunisasi

KASUS campak di Indonesia hingga Agustus 2025 masih cukup mengkhawatirkan. Terakhir di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sampai ditetapkan statusnya sebagai daerah dengan kejadian luar biasa (KLB) campak karena kasusnya mencapai 2.139 per 24 Agustus 2025, dengan 17 di antaranya meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, drg. Ellya Fardasah, M. Kes, menyampaikan terjadi beberapa periode puncak kasus suspek campak di wilayahnya sepanjang tahun 2025.

"Penemuan kasus suspek campak tertinggi tahun 2025 terdapat pada bulan Juli, yaitu 382 kasus. Diketahui, mayoritas suspek campak atau 89 persen tidak mendapatkan imunisasi. Dan kasus paling banyak ditemukan pada usia balita," jelas drg. Ellya dalam konferensi pers virtual yang digelar Kemenkes, Selasa (26/8/2025).

Kemudian penyebab tingginya

kasus campak di Sumenep diikuti oleh 5 persen anak tidak mendapat imunisasi MR dua dosis, 4 persen anak tidak diimunisasi MR 1 dosis, dan 2 persennya tidak menjawab.

Dari 2.139 kasus suspek campak di Kabupaten Sumenep, sebanyak 1.322 di antaranya (61,8 persen) merupakan balita berusia 0-4 tahun. Dan mayoritas dialami oleh anak laki-laki, yaitu 51 persen. Hasil pemeriksaan spesimen menunjukkan 205 kasus positif campak.

Saat ini, imunisasi serentak untuk vaksin campak dan rubella tengah dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit tersebut.

"Sudah kami lakukan ORI (Outbreak Response Immunization), bahasa sederhana imunisasi serentak. Itu dilakukan mulai 25 Agustus 2025 kemarin, sesuai hasil rapat lintas sektor," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat kunjungannya di Blitar, Selasa (26/8/2025).

KASUS CAMPAK DI SUMENEP

(Data Pemkab Sumenep, periode Januari-Agustus 2025)

Kasus: **2.035 orang**

Pasien meninggal: **17 orang**

Sebaran: **26 kecamatan**

Penyebab: **Anak tidak diimunisasi**

Khofifah menyebutkan sejumlah pihak turut berperan dalam percepatan imunisasi serentak di Sumenep itu. Mulai dari tim Pemprov Jatim, tim kesehatan dari Universitas Airlangga (UNAIR), tim dari WHO dan UNICEF.

Selain itu, tim dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diterjunkan langsung untuk menangani kasus campak di Sumenep tersebut.

"Harapannya memang percepatan imunisasi serentak campak rubella di 26 kecamatan di Sumenep bisa disegerakan dan dijangkau. Saya sudah ke sana, untuk mengecek langsung dan memulai imunisasi serentak itu," jelasnya. (wid,ist,ant/dya)

BUTUH RP13 M/TAHUN, PROGRAM 1.000 SARJANA KOTA BATU DIAKUI BARU BISA OPTIMAL 2026

BATU- Pemerintah Kota (Pemkot) Batu setidaknya membutuhkan dana Rp13 miliar untuk menjalankan program Beasiswa 1.000 Sarjana secara penuh. Program ini diproyeksikan baru berjalan optimal pada 2026 mendatang. Pasalnya di tahun ini, baru bisa menjangkau 200 penerima karena keterbatasan alokasi APBD 2025.

"Tahun depan baru bisa dipenuhi 1.000 penerima, ya. Karena di tahun 2025 ini, ketika berjalan pertama kalinya, APBD kan sudah ditetapkan. Kalau targetnya, di 2025 sebanyak 200 penerima dan itu sudah tercapai," ujar Kepala Dinas pendidikan (Dindik) Kota Batu, M Chori, Selasa (26/8/2025).

Chori menjelaskan, perhitungan kebutuhan dana untuk merealisasikan program penuh pada 2026 mencapai Rp13 miliar. Estimasi itu, menurutnya dihitung dari rata-rata uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa sebesar Rp6,5 juta per semester.

"Kalau dari hitung-hitungan kami, itu rata-rata UKT Rp6,5 juta per semester. Nah kalau setahun kan

berarti dibutuhkan Rp13 miliar," katanya.

Pada tahun ini, Pemkot Batu baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar dari APBD untuk pelaksanaan program Beasiswa 1.000 Sarjana. Dana tersebut diperkuat dengan tambahan Rp325 juta dari program tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) salah satu perbankan.

Meski kuota terbatas, Chori menyebut animo masyarakat untuk mendaftar cukup tinggi. Dari target 200 penerima, jumlah pendaftar mencapai 284 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi, sebanyak 214 orang dinyatakan memenuhi syarat.

"Pendaftar tetap kami terima. Kalau anggaran masih cukup, akan diprioritaskan tahun ini. Namun apabila tidak mencukupi, tetap akan dipenuhi pada tahun depan," jelas Chori.

Terkait syarat penerima, Chori menegaskan peserta wajib berstatus warga Kota Batu. Selain itu, mahasiswa harus menempuh pendidikan di

perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS) yang memiliki akreditasi minimal B.

Selain dua syarat tersebut, Chori mengatakan, calon penerima manfaat juga wajib memiliki prestasi akademik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,25. Atau memiliki prestasi non-akademik di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

"Keluarga tidak mampu juga tetap menjadi prioritas.

Kalau untuk universitas yang sudah bekerja sama ada 11 kampus di Malang Raya dan juga ada di Surabaya," tambahnya.

Lebih lanjut, Chori menyebut program Beasiswa 1.000 Sarjana tidak hanya menasar mahasiswa

berprestasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penghafal Al-Quran. Bahkan, program ini juga terbuka bagi pelaku UMKM, penggiat koperasi, dan perangkat desa melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). (Santi/Dya)



Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M Chori. (Santi/Lentera)

Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik TPA SUPIT URANG STRATEGIS UNTUK MALANG RAYA

(Ilustrasi) Pengolahan sebagian volume sampah di TPA Supit Urang untuk dijadikan pupuk kompos. (Santi/Lentera)



kepastian ini semakin menguat usai pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, dengan kepala daerah Malang Raya beberapa waktu lalu.

"Pemilihan ini tinggal diperkuat dengan kajian, meskipun demikian hampir bisa dipastikan TPA Supit Urang menjadi titik PSEL," ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Raymond menjelaskan, PSEL merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan untuk mewujudkan konsep zero waste atau nihil residu sampah.

Menurutnya, TPA Supit Urang dipertimbangkan karena memiliki lahan kosong seluas 5 hektare, sesuai persyaratan minimal. Selain itu, volume sampah harian di Malang Raya juga memenuhi kebutuhan minimal 1.000 ton.

"Kalau untuk memenuhi persyaratan minimal 1.000 ton, kami bekerja sama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kemarin saat pertemuan

lanjutan sudah dibagi," terangnya.

Dari pembagian tersebut, Kota Malang akan menyumbang sekitar 520 ton, Kabupaten Malang 400 ton, dan Kota Batu 50 ton sampah per hari. Dikatakannta, PSEL nanti akan ditempatkan di area atas TPA Supit Urang, yang sebelumnya merupakan timbunan sampah lama dan bekas kantor TPA.

"Sebelum pembangunan dimulai, lahan tersebut akan diperkuat pondasinya. Kemudian dengan tambahan volume sampah yang masuk, kami juga mengusulkan pembangunan jalan baru menuju lokasi," katanya.

Menurut Raymond, pembangunan jalan baru tersebut untuk mengantisipasi potensi konflik dengan warga. Akibat meningkatnya mobilitas truk sampah jika masih menggunakan akses eksisting di Jalan Rawisari, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun.

Lebih lanjut, Raymond menyebut peoyek ini kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun 2027 melalui skema APBN atau kerja sama tiga pemerintah daerah di Malang Raya.

Secara teknis, hanya sampah

anorganik yang bisa dimanfaatkan dalam PSEL, seperti plastik, kaca, karet, logam, dan limbah elektronik. Energi listrik yang dihasilkan dari fasilitas tersebut nantinya akan dibeli langsung oleh PLN.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri LH, Hanif Faisol menyampaikan terkait pembangunan fasilitas PSEL, akan melibatkan akademisi dari Universitas Brawijaya (UB) untuk membuat kajian cepat atau rapid feasibility study (FS).

Meskipun kemungkinan besar berlokasi di TPA Supit Urang, namun Hanif mengatakan kajian ini akan memetakan kesiapan lokasi TPA. Agar dapat menguntungkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

"Supaya fair, kami akan meminta bantuan kepada Rektor UB untuk membuat sedikit kajian terkait dengan kesiapan di mana lokasi ditempatkan nanti. Nanti setelah itu, baru FS detailnya. Jadi ini rapid FS yang akan menggambarkan di mana possibility yang paling menguntungkan," terangnya, ditemui usai Kunker di Malang pada Senin (18/8/2025) lalu. (Santi/Dya)

DUA POLISI TEWAS DITEMBAK DI AUSTRALIA, PELAKU MASIH BURON

Dua anggota kepolisian dilaporkan tewas ditembak dalam sebuah insiden di kawasan pedesaan Victoria, Australia pada Selasa (26/8/2025) waktu setempat, sementara seorang petugas lainnya mengalami luka akibat kejadian tersebut.

Kepolisian negara bagian Victoria, dikutip dari AFP, Selasa (26/8/2025), menyebut penembakan mematikan itu sebagai "insiden aktif" karena pelaku penembakan berhasil kabur.

Menurut keterangan kepolisian dan media lokal Australia, insiden berdarah itu terjadi di area Porepunkah, yang terletak di kaki gunung setempat di wilayah Victoria bagian timur laut.

Bush mengatakan para petugas ditembak, dengan dua orang tewas dan satu orang luka parah dan dirawat di rumah sakit. Ia mengimbau warga untuk tetap di rumah sementara polisi mencari pelaku penembakan.

Sejumlah media lokal, termasuk televisi ABC, melaporkan bahwa konfrontasi itu telah menewaskan dua polisi dan melukai satu polisi lainnya. Pelaku penembakan tersebut melarikan diri dari lokasi kejadian dan pengejaran masih terus dilakukan saat ini.

"Ini masih merupakan insiden aktif dan kami akan memberikan informasi lebih lanjut ketika situasi sudah aman," sebut Kepolisian negara bagian Victoria dalam pernyataannya.

"Kami meminta masyarakat untuk menghindari area tersebut," imbuh pernyataan tersebut.

Kepolisian Victoria tidak menjelaskan lebih lanjut soal pemicu penembakan tersebut.

Namun, laporan surat kabar lokal, The Age, menyebutkan bahwa personel kepolisian mendarangi sebuah properti di area Porepunkah untuk mengeksekusi surat perintah terkait tuduhan pelecehan seksual di masa lalu. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal kasus yang dimaksud.

Sementara itu, Australian Broadcasting Corporation mengatakan polisi yakin pelaku penembakan adalah "warga negara berdaulat". Warga negara berdaulat percaya bahwa pemerintah tidak sah.

Kota Porepunkah adalah rumah bagi 1.000 penduduk dan terletak di kaki pegunungan Alpen Australia.

"Hari ini merupakan hari duka cita dan keterkejutan yang mendalam bagi komunitas kami. Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja dari dua petugas polisi

yang tewas secara tragis di Porepunkah," ujar Wali Kota Sarah Nicholas dalam sebuah pernyataan.

Fasilitas dewan lokal di seluruh kota, termasuk perpustakaan, pusat informasi dan depot, akan tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut, tambah Nicholas.

Kepala Sekolah Dasar Porepunkah,

Jill Gillies, mengatakan kepada ABC Radio Melbourne bahwa sekolah tersebut terpaksa menerapkan karantina wilayah, dengan sekitar 90 siswa berlindung di dalam ruangan mulai pukul 11.30 waktu setempat.

ABC kemudian melaporkan bahwa karantina wilayah telah dicabut.

Lapangan terbang setempat juga ditutup karena respons darurat yang sedang berlangsung. (AFP, ABC, The Age, ist/nei)



Polisi Victoria berdiri di lokasi penembakan di Porepunkah, Victoria, Australia, Selasa (26/8/2025). Sebagian kota pedesaan, termasuk sebuah sekolah dasar, telah diisolasi setelah dua petugas polisi dilaporkan ditembak mati dan seorang petugas ketiga mengalami luka kritis. (Foto: Reuters)

SITUASI KEAMANAN DI AUSTRALIA

Aspek Keamanan	Rincian Utama
Spionase & Campur Tangan Asing	Target: pertahanan, akademik, infrastruktur kritis (AUKUS & nuklir).
Terorisme & Ekstremisme	Ancaman nasional PROBABLE, ekstremisme kanan & lone wolf meningkat.
Ancaman Siber	Serangan siber jadi ancaman terbesar (65% publik anggap "kritis").
Geopolitik & Regional	Indo-Pasifik tegang: latihan militer China & potensi konflik global.
Kasus Terbaru: Iran	Serangan antisemit terkait IRGC; RI usir diplomat Iran.
Persepsi Publik	Hanya 46% warga merasa aman; kekhawatiran: siber, perang besar, iklim.

Soal Pembakaran, Dubes Iran Diusir

PEMERINTAH Australia pada Selasa (26/8/2025) menuduh Iran bertanggung jawab atas dua kasus pembakaran sinagoge di Sydney dan Melbourne. Akibatnya, duta besar Iran diperintahkan meninggalkan negara itu dalam waktu tujuh hari. Peristiwa ini menjadi pengusiran diplomat Iran pertama yang dilakukan oleh Australia sejak Perang Dunia II.

Sejak pecahnya konflik Israel-Gaza pada Oktober 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam insiden antisemitisme dan Islamofobia di Australia. Rumah, sekolah, sinagoge, dan kendaraan milik warga Australia menjadi sasaran vandalisme dan pembakaran sengaja, sementara laporan insiden Islamofobia juga melonjak tajam.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO) telah mengumpulkan intelijen yang kredibel bahwa Iran telah mengarahkan setidaknya dua

serangan.

"Ini adalah tindakan agresi yang luar biasa dan berbahaya yang didalangi oleh negara asing di tanah Australia," ujar Albanese dalam jumpa pers. "Ini adalah upaya untuk merusak kohesi sosial dan menimbulkan perpecahan di komunitas kami."

Iran telah berusaha "menutupi keterlibatannya" dalam serangan tahun lalu di sebuah restoran kosher di Sydney dan Sinagoga Adass Israel di Melbourne, kata Albanese. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam serangan tersebut.

Kedutaan Besar Iran di Canberra tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Badan keamanan Australia mengatakan kemungkinan besar Iran telah mengarahkan serangan lebih lanjut, kata Albanese, seraya menambahkan bahwa Australia telah menanggukkan operasi di kedutaan besarnya di Teheran dan semua diplomatnya aman di negara ketiga.

Pemerintah akan menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Teheran sebagai organisasi teroris, tambah Albanese.

Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan Duta Besar Ahmad Sadeghi dan tiga pejabat Iran memiliki waktu tujuh hari untuk pergi, yang merupakan pengusiran utusan pertama Australia sejak Perang Dunia Kedua.

"Tindakan Iran benar-benar tidak dapat diterima," ujarnya dalam pengarahannya tersebut.

IRGC mengarahkan orang-orang di Australia untuk melakukan kejahatan, kata Mike Burgess, direktur jenderal badan keamanan tersebut.

"Mereka hanya menggunakan potongan-potongan, termasuk orang-orang yang merupakan penjahat dan anggota geng kejahatan terorganisir untuk melakukan perintah mereka atau mengarahkan perintah mereka," tambahnya. (Reuters, ist/nei)

Cobra Pose, Gerakan Yoga Sederhana Penuh Manfaat

Cobra pose merupakan salah satu gerakan yoga yang ramah untuk pemula, terutama bagi mereka yang kerap merasakan nyeri punggung akibat aktivitas harian. Jika dilakukan secara rutin, gerakan ini dapat membantu memperkuat otot punggung sekaligus otot perut.

Dalam yoga, cobra pose dikenal dengan sebutan Bhujangasana. Gerakan ini dinamakan cobra pose karena menyerupai posisi ular kobra ketika akan menyerang mangsanya. Saat melakukannya, tulang belakang perlu ditekek ke arah belakang sehingga berbagai otot dapat terlatih menjadi lebih kuat sekaligus lebih rileks.

Pada dasarnya, cobra pose bertujuan untuk merelaksasikan otot-otot tubuh bagian depan, seperti dada, pinggul, perut, bicip, dan leher, sekaligus mengencangkan atau memperkuat otot-otot bagian belakang, mulai dari punggung atas, trisep, tulang belakang, paha belakang, hingga bokong.

Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, latihan cobra pose setiap hari secara konsisten juga membawa manfaat bagi kesehatan mental.

Meredakan Nyeri Punggung

Nyeri punggung paling sering disebabkan oleh rutinitas sehari-hari yang mengharuskan duduk hampir sepanjang hari. Duduk terlalu lama bisa menyebabkan otot dada tegang dan otot punggung lemah sehingga gampang mengalami nyeri kronis.

Untuk mengatasi nyeri punggung, Anda bisa coba rutin latihan cobra pose. Manfaat cobra pose ini didukung oleh berbagai penelitian yang mengatakan bahwa nyeri punggung bawah berkurang secara signifikan jika melakukan cobra pose selama 12 minggu secara konsisten.

Merelaksasikan Otot Dada, Bahu, dan Perut

Manfaat cobra pose juga bisa untuk merelaksasikan otot-otot tubuh, terutama otot dada, bahu, dan

perut yang sering kali tegang akibat aktivitas sehari-hari. Manfaat ini diperoleh dari gerakan cobra pose yang mengangkat dan membuka dada.

Otot-otot yang rileks membuat sirkulasi darah di area tersebut menjadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang lancar, keluhan nyeri di dada, bahu, dan perut pun bisa berkurang dan dicegah.

Memperkuat Otot Tulang Belakang

Rutin latihan cobra pose dapat memperkuat otot-otot tulang belakang, mengurangi kekakuan di area punggung bawah, dan mengencangkan otot pinggul serta bokong. Manfaat cobra pose ini bisa sangat berguna bagi pekerja kantoran yang hampir setiap hari menghabiskan banyak waktu duduk di depan laptop.

Memperbaiki Postur Tubuh

Kebiasaan sehari-hari, seperti bekerja di depan komputer atau bermain gawai terlalu lama, akan berdampak buruk terhadap postur tubuh, misalnya tubuh menjadi terlihat lebih bungkuk atau postur kepala cenderung lebih ke depan dari badan.

Nah, Anda bisa lakukan cobra pose secara rutin untuk memperbaiki postur tubuh. Pose yoga ini akan meregangkan otot-otot besar di dada dan tubuh bagian atas sehingga tubuh menjadi lebih rileks.

Mengatasi Insomnia

Manfaat cobra pose juga bisa mengatasi masalah susah tidur atau insomnia yang sering dialami oleh banyak orang. Dalam hal meningkatkan kualitas tidur, berlatih yoga bahkan dinilai lebih baik daripada aktivitas aerobik, seperti berlari atau berjalan.

Banyak penelitian yang juga mengatakan bahwa orang yang melakukan cobra pose setiap hari mengalami peningkatan kualitas tidur, terutama pada wanita menopause dan penderita diabetes tipe 2.

Mengurangi Gejala Depresi

Pada prinsipnya, yoga adalah olahraga yang menggabungkan latihan pernapasan, meditasi, dan pose tertentu untuk memberikan efek relaksasi, baik bagi tubuh maupun pikiran. Semua pose yoga, termasuk cobra pose, bermanfaat untuk meredakan ketegangan dan menenangkan pikiran.

Oleh karena itu, olahraga ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk meringankan gejala depresi, termasuk rasa putus asa, cemas, dan stres. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa rutin melakukan yoga hatha, yang mencakup cobra pose, sebanyak 2 kali seminggu dapat mengatasi gejala depresi ringan.

Cara Melakukan

Cobra pose adalah salah satu gerakan yoga pemula yang bisa dilakukan sendiri rumah, asalkan caranya benar. Anda hanya perlu menyiapkan matras yoga yang layak pakai dan mengikuti langkah-langkah melakukan cobra pose berikut ini:

Mulailah dengan berbaring tengkurap di atas matras yoga dengan dahi menempel pada permukaan. Rapatkan kedua kaki hingga tumit saling bersentuhan. Letakkan telapak tangan di samping bahu dengan jari-jari menghadap ke depan, sambil menjaga siku tetap dekat dengan sisi tubuh.

Tarik napas perlahan, lalu angkat kepala hingga perut sedikit demi sedikit. Luruskan siku untuk mengangkat tubuh bagian atas, namun pastikan panggul atau tulang kemaluan tetap menempel pada matras. Tarik dada dan bahu ke belakang sambil tetap menjaga bahu rileks. Biarkan leher lurus dan arahkan pandangan ke langit-langit.

Pertahankan posisi dengan siku lurus serta panggul dan paha tetap menempel di matras. Akhiri gerakan dengan menghembuskan napas

perlahan saat tubuh diturunkan kembali ke posisi semula.

Cobra pose adalah gerakan yoga yang fleksibel. Artinya, Anda bisa menyesuaikan gerakannya sesuai batas kemampuan Anda dan Anda pun tidak perlu memaksakan diri. Sebagai contoh, jika bagian punggung bawah Anda terasa nyeri dan tegang untuk melakukan cobra pose seperti di atas, Anda bisa melakukan variasi low cobra pose.

Pada variasi gerakan ini, Anda tidak perlu mengangkat badan bagian atas dengan siku yang lurus, tetapi bisa dengan menekuk siku dan biarkan badan Anda bertumpu pada lengan bawah. Kepala Anda pun tidak perlu melihat ke atas, tetapi bisa menatap lurus ke depan.

Meski termasuk pose yoga yang santai, cobra pose tetap berisiko menyebabkan cedera bila dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Untuk menghindarinya, usahakan jangan terlalu cepat mengangkat tubuh bagian atas, hindari meregangkan siku secara berlebihan, dan jangan menjulurkan leher ke belakang jika Anda mengalami nyeri leher.

Itulah berbagai hal yang perlu Anda ketahui seputar cobra pose dalam yoga. Untuk mendapatkan manfaat cobra pose yang optimal, lakukanlah gerakan ini secara rutin di rumah setiap hari.

Namun, jika Anda menderita sindrom lorong karpal (CTS) atau cedera pada punggung, tulang rusuk, leher, lengan, perut, atau bahu yang cukup parah, sebaiknya hindari melakukan latihan cobra pose. Ibu hamil dan orang yang baru saja menjalani operasi perut juga disarankan untuk tidak melakukan cobra pose.

Meski cobra pose umumnya aman, gerakannya ringan, dan bisa dilakukan sendiri di rumah, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau instruktur yoga profesional terlebih dahulu sebelum mulai rutin melakukan latihan ini, terutama jika Anda memiliki riwayat cedera punggung, leher, atau kondisi medis tertentu yang dapat memengaruhi keamanan saat berolahraga. (nei,ist/dya)



APPLE SIAPKAN AIRPODS PRO 3 DENGAN SENSOR JANTUNG

Apple diprediksi akan meluncurkan AirPods Pro 3 tahun ini dengan tambahan fitur pemantauan detak jantung, berdasarkan laporan buletin Power On terbaru yang dikutip Macrumors pada Minggu (24/8/2025).

Menurut laporan Mark Gurman dari Bloomberg dalam buletin Power On terbaru, Apple tengah mempersiapkan sejumlah produk baru yang akan dirilis pada musim gugur 2025. Rencana ini disebut

sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperbarui sekaligus memperluas lini perangkat andalannya.

Beberapa produk yang akan diluncurkan mencakup pembaruan pada Apple Watch, versi terbaru headset Vision Pro dengan performa

lebih cepat, serta iPad Pro yang dibekali prosesor M5. Kehadiran perangkat-perangkat baru ini diperkirakan akan semakin memperkuat ekosistem Apple di pasar teknologi global.

"Anda juga bisa menantikan earbuds AirPods Pro baru (saya melaporkan awal tahun ini bahwa Apple sedang mengembangkan sepasang earbud dengan pemantau detak jantung), serta HomePod mini dan dekoder Apple TV," kata Mark Gurman dalam siaran buletin terbarunya.

Awal tahun ini, Apple telah menghadirkan fitur pemantauan detak jantung pada perangkat Powerbeats Pro 2 sebagai bagian dari inovasi terbarunya di lini audio.

Saat kedua earbuds Powerbeats Pro 2 terpasang di telinga, dan fitur pemantauan detak jantung aktif, Apple menyatakan, sensor optik LED akan berdenyut lebih dari 100 kali per detik untuk mengukur detak jantung melalui aliran darah.

Menurut perusahaan, fitur ini terintegrasi dengan aplikasi kebugaran populer untuk mengumpulkan data selama latihan dan menyelaraskannya dengan aplikasi Kesehatan Apple di iPhone.

Fitur ini berbasis teknologi penginderaan detak jantung Apple Watch.

Jika seseorang mengenakan Powerbeats Pro 2 dan Apple Watch, Apple menyatakan, maka aplikasi akan secara otomatis menggunakan data detak jantung dari Apple Watch, dan hal yang sama mungkin juga akan berlaku dalam penggunaan AirPods Pro baru.

Selain membawa fitur pemantauan detak jantung, AirPods Pro generasi terbaru juga diperkirakan hadir dengan peningkatan kualitas audio, teknologi peredam bising aktif yang lebih canggih, serta kemungkinan perubahan desain untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman dan optimal. Kehadiran fitur-fitur baru ini diharapkan semakin memperkuat posisi AirPods Pro sebagai salah satu perangkat audio premium Apple. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM
Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Gaji Tunggal (dari Hal 1) ...

Rencana penerapan single salary bagi para ASN dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2026 itu bukan menjadi yang pertama kalinya digulirkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Sistem single salary lebih dulu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dalam RPJPN tersebut pemerintah akan membuat kebijakan untuk meningkatkan meritokrasi dan integritas di kalangan ASN. Langkah tersebut akan dicapai dengan cara penguatan sistem merit dalam manajemen ASN melalui penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) dan sistem pensiun.

Dua sistem itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan mobilitas talenta dan meningkatkan kesejahteraan ASN, peninjauan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, serta penguatan fungsi pengawasan atas penerapan sistem merit, dilansir cncindonesia.

Bahkan, lebih detail penjelasan tentang sistem penggajian tunggal sudah lebih lama termuat dalam Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil: Design Gaji dan Tunjangan pada 2017. Disebutkan bahwa single salary system adalah sistem gaji PNS yang hanya akan memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan) dan sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Grading ini akan menunjukkan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan risiko pekerjaan.

Kemudian, setiap grading akan dibagi menjadi beberapa tahapan dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan ASN yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Masalah gaji tunggal juga sudah pernah dibahas oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang mengatakan dengan sistem penggajian tunggal, maka ASN akan menerima gaji pokok lebih besar dari yang ada selama ini. Sebagaimana diketahui, gaji pokok ASN terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan ke-19 atas PP Nomor 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

"Kita menyambut bangga dan gembira manakala pemerintah akan memberlakukan single salary terkait dengan di mana ada wacana bahwa PNS hanya akan menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya lah yang diperbesar," ucap Ketua 1 Dewan Pengurus Korpri Nasional Reydonnyzar Moenek (Donny) itu sebagaimana dikutip cncindonesia, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, konsep single salary secara garis besar menyatukan seluruh komponen gaji yang selama ini terpisah, seperti tunjangan anak dan istri, hingga tunjangan beras dan sebagainya ke dalam gaji pokok para aparatur sipil negara. Hanya tunjangan jabatan dan fungsional yang masih akan di luar perhitungan.

"Yang saya tangkap dengan skema tersebut tentunya tunjangan anak dan istri, dan beras, dan tunjangan-tunjangan lain sudah masuk semua menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional tetap diatur dan kita lihat nanti," tegasnya.

Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Sistem grading akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan ASN.

Gaji dalam sistem itu disebut merupakan imbalan yang diberikan kepada ASN sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya. Sedangkan grading adalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan resiko.

Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan ASN yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Untuk perhitungan tunjangan kinerja diberikan sesuai capaian kinerja ASN yang berfungsi sebagai penambahan bagi penghasilan atau pengurang penghasilan. Tunjangan kinerja akan diberikan sebagai tambahan penghasilan, apabila capaian kinerja ASN dinilai baik atau sangat baik.

Tunjangan kinerja dapat diberikan sebagai penurunan penghasilan apabila output kinerjanya kurang atau buruk, Besaran tunjangan kinerja sebesar 5% dari gaji ASN yang penerapannya sama disetiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Oleh karena itu dalam tunjangan kinerja, dimungkinkan ASN yang mempunyai kontrak kinerja jabatan

yang sama bisa mendapatkan tunjangan kinerja berbeda, tergantung pada hasil capaian kinerjanya.

Sedangkan untuk perhitungan tunjangan kemahalan berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing ASN bekerja.

Indeks harga yang berlaku di daerah penempatan ASN akan dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indeks harga masing-masing daerah akan dievaluasi paling lama setiap tiga tahun. Secara otomatis ASN yang ditempatkan di daerah yang indeksnya berbeda, akan berbeda pula tunjangan kemahalannya.

Dengan penjelasan itu, maka sistem penghasilan ASN dalam konsep single salary ini nantinya akan ditentukan dengan rumus indeks gaji ditambah indeks tunjangan kinerja ditambah indeks kemahalan daerah, berdasarkan Civil Apparatus Policy Brief Nomor: 010-Agustus 2017.

Konsep sistem penggajian single salary menjadi pilihan pemerintah karena bila merujuk jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara Edisi II Tahun 2012, sistem penggajian ASN khususnya para pegawai negeri sipil atau ASN selama ini sebatas didasarkan pada pangkat dan masa kerja, dan belum di dasarkan pada bobot pekerjaan atau jabatan.

Selain itu, besaran Gaji ASN selama ini juga dinilai tidak mencerminkan penghasilan yang sesungguhnya, karena di samping menerima gaji pokok, ASN juga menerima tunjangan (keluarga, pangan, jabatan, khusus) dan sejumlah honorarium dari berbagai sumber lainnya. Struktur Gaji ASN yang sangat kompleks itu, lalu disebut sulit dijadikan barometer kinerja bagi seorang ASN.

Single salary sejatinya bukan barang baru. Sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penerapan skema gaji tunggal pada 2014 lalu. Skema ini diklaim bakal meringankan beban anggaran negara.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana turut mengamini bahwa lembaganya menjadi pilot project skema gaji tunggal.

Meski wacana penerapan single salary ini telah lama bergulir dan kembali dimunculkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif menjelaskan hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antar instansi mengenai wacana tersebut. Maka dari itu, ASN masih akan menggunakan skema yang saat ini berjalan.

"Sampai saat ini skemanya masih seperti yang sekarang ini," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senin (25/8/2025).

Diketahui dalam dokumen tersebut, tertulis sistem penggajian tunggal masuk dalam rencana pemerintah ke depan. Bersamaan dengan penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan. "Nanti akan kita tindak lanjuti," lanjut Zudan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini sudah pernah menepis bahwa pemerintah bakal segera mengimplementasikan single salary. Ia mengatakan pihaknya masih akan fokus menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN.

Jika PP Manajemen ASN sudah sah, Rini menyebut aturan-aturan turunan lainnya otomatis bakal ikut serta. Pada April 2025 lalu, Kemenpan RB mengaku masih menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tersebut.

"Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap. Kita lihat dulu ya (penerapan single salary ASN), tapi kita tentunya ingin ada transformasi ke arah itu," jelas Rini selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025) dilansir cncindonesia, Selasa (26/8/2025).

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) telah membahas implementasi sistem tunggal untuk pembayaran gaji pegawai berbasis digital yang akan diterapkan mulai 2026. Sistem tunggal tersebut sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,

Kepala Biro Keuangan dan BMN, Ahmad Hidayatullah, menjelaskan sistem tunggal ini akan mengintegrasikan dua aplikasi utama: sistem informasi kepegawaian (Simpeg) dan Aplikasi Gaji Web (AGW). "Dengan adanya sistem tunggal ini, Kemenag berharap dapat meminimalisir keterlibatan manual, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah kecurangan dalam proses penggajian," tutur Ahmad Hidayatullah Rakor yang berlangsung pada Selasa (22/7/2025).

Kemenag juga mengidentifikasi permasalahan belanja pegawai pada tahun 2024, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penganggaran dengan formasi pegawai baru, serta pengelolaan anggaran yang masih tersebar pada masing-masing satuan kerja (Satker). Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem tunggal ini akan diimplementasikan pada tahun 2026, dengan tujuan mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keakuratan data kepegawaian. (han,ist/lut)

POLRI TETAPKAN 28 TERSANGKA KASUS BERAS TIDAK SESUAI STANDAR MUTU

Kepala Satgas Pangan Polri sekaligus Dertipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan penyidiknya telah menetapkan 28 orang sebagai tersangka, kasus dugaan memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Di antara tersangkanya adalah Direksi dari 2 perusahaan.

“25 perkara, tersangka 28 dan rata-rata semua terkait dengan masalah operasional produksi beras,” kata Helfi dalam diskusi publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan mengutip Antara, Selasa (26/8/2025).

Helfi berharap tidak ada lagi tersangka baru dalam kasus ini. Penegakan hukum terhadap para tersangka ini diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap pelaku usaha lainnya, sehingga mereka yang melakukan praktik serupa supaya segera mengembalikan mutu beras sehingga sesuai dengan yang tertera dalam kemasan.

“Kami tidak berharap (jumlah tersangka) makin bertambah, artinya harusnya dengan penegakan hukum ini bisa mengerem para pelaku usaha yang memang berniat masih seperti yang kemarin, sebelum (2:14) dilakukan penegakan hukum. Silahkan dikembalikan kepada yang seharusnya,” ujarnya.

Meski demikian, Helfi menandakan bahwa Satgas Pangan Polri tidak akan mencari-cari beras yang tidak sesuai standar mutu di pasaran, pihaknya hanya melakukan penertiban dan penegakan hukum akan menjadi opsi terakhir.

“Kami hanya menertibkan, tidak ada mencari-cari. Kami sudah sampaikan supaya rekan-rekan produsen, distributor bisa menjual beras yang memang sesuai standar komposisi yang tertera, artinya mereka menjual menggunakan komposisi yang dia mau dengan harga yang sudah diatur, ya harusnya isinya juga sesuai,” tuturnya.

Mengenai sejak kapan kasus beras tidak sesuai dengan standar mutu itu terjadi, Helfi mengatakan barang bukti yang ditemukan penyidikan menunjukkan Februari 2025. “Dari hasil itu kan kami baru bisa bicara fakta, faktanya barang bukti yang kami temukan yang paling tua bulan Februari 2025. Kami enggak bisa berandai-andai yang sebelumnya,” tuturnya.

Helfi juga mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan produsen beras seperti tidak pernah melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas beras yang diproduksinya.



Polri Tetapkan 28 Tersangka Kasus Beras Tak Sesuai Standar Mutu. (Beritasatu.com)

“Tidak pernah mereka lakukan sejak berdiri perusahaan itu. Mereka tidak pernah melakukan uji lab (laboratorium), apalagi ada labnya di perusahaan itu, tidak ada. Uji saja belum pernah,” kata Helfi.

Berdasarkan penemuan tersebut, kemudian Satgas Pangan Polri melakukan penyegelan terhadap sejumlah fasilitas produksi produsen beras yang kedatangan memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan.

Selanjutnya, penyidik mencabut segel itu dengan tujuan agar produsen beras tersebut bisa kembali memproduksi beras yang sesuai standar mutu demi menjaga pasokan pangan. Sayangnya, produsen tersebut tak kunjung kembali berproduksi, hingga akhirnya Satgas Pangan Polri kembali mendatangi produsen tersebut dan diketahui bahwa produsen terkait tidak berproduksi karena tidak mengukur standar mutu beras hasil produksinya.

“Namun ada yang memang tidak berproduksi, kenapa? Karena mereka tidak punya lab, mereka menjual kemasan, tapi tidak punya lab. Artinya beras yang diproduksi, ya sudah asal jadinya berapa saya tidak tahu, yang penting saya jual premium,” ujarnya.

Lantas, seperti apa produksi yang dilakukan, Helfi menandakan bahwa produksinya hanya menggiling pagi untuk kemudian menjadi beras. “Jadi pokoknya giling, selesai, jadi beras, langsung kemas premium, jual, harga tinggi. Itu yang terjadi. Jadi macam-macam sekali yang dilakukan para produsen ini,” tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan uji

laboratorium, Satgas Pangan Polri menetapkan bahwa beras premium bermerek Sania, Fortune, Sovia, dan Sip tidak sesuai dengan standar mutu beras premium sebagaimana ditetapkan pemerintah. Atas temuan tersebut Satgas Pangan Polri menetapkan tiga tersangka dari PT Padi Indonesia Maju selaku produsen beras tersebut.

Helfi Assegaf pada Selasa (5/8/2025) menyampaikan komposisi beras pada keempat merek beras tersebut tidak sesuai standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) beras premium nomor 6128-2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan tiga tersangka sesuai dengan peran dan perbuatannya. Ketiganya belum ditahan oleh penyidik. Ketiga tersangka itu adalah S (Saronto Soebagio) selaku Presiden Direktur PT PIM, AI selaku kepala pabrik PT PIM, dan DO selaku Kepala Quality Control PT PIM.

Beberapa fakta hukum yang didapat penyidik sebagai dasar penetapan tersangka adalah komposisi beras yang tidak sesuai standar mutu SNI sebagaimana diatur pemerintah. Kemudian, tidak ada arahan khusus dari direksi PT PIM untuk memastikan mutu beras sesuai standar, termasuk setelah penyidik

mendapatkan temuan yang diikuti dengan teguran tertulis dan permintaan klarifikasi kepada PT PIM pada 8 Juli lalu.

“Pihak direksi hanya menanyakan secara lisan kepada manajer factory dan tidak ada upaya perbaikan terhadap temuan tersebut,” ujar Helfi dilansir Kompas.

Penyidik juga menemukan dokumen instruksi kerja prosedur operasi standar, tes analisis quality control (QC), proses produksi beras, dan pengendalian ketidaksesuaian produk tidak dilaksanakan dengan baik. Petugas QC yang bertugas melakukan uji laboratorium juga hanya ada satu dari total 22 pegawai.

Pengecekan kualitas seharusnya dilakukan setiap dua jam. Namun, fakta yang ditemukan penyidik, pengecekan hanya dilakukan 1-2 kali per hari. (han,ant,ist/lut)



“Kami hanya menertibkan, tidak ada mencari-cari. Kami sudah sampaikan supaya rekan-rekan produsen, distributor bisa menjual beras yang memang sesuai standar komposisi yang tertera, artinya mereka menjual menggunakan komposisi yang dia mau dengan harga yang sudah diatur, ya harusnya isinya juga sesuai,”

**Brigjen Pol.
Helfi Assegaf**

Kepala Satgas Pangan Polri sekaligus Dertipideksus Bareskrim Polri,